



## **PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID 19 MELALUI PENDEKATAN KEWIRAUSAHAAN**

**Magfirotul Karima<sup>1</sup>, Naim<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Faculty of Economics and Business, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author; [magfirohkarima@gmail.com](mailto:magfirohkarima@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 menimbulkan krisis ekonomi yang berbeda-beda di semua negara dan berdampak pada semua kategori dunia usaha. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dan alternatif strategi penanggulangannya menggunakan pendekatan kewirausahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review, dengan melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan mengenai dampak pandemi dan kewirausahaan sosial, terdapat delapan artikel yang dianalisis. Akibatnya pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif dengan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia dan meningkatkan angka kemiskinan baru, namun di sisi lain terdapat dampak positif, yaitu meningkatkan kesalehan sosial masyarakat Indonesia dan Ada banyak yang meraup untung besar di masa pandemi Covid-19. Perlu mempertimbangkan model strategi penanggulangan yang dapat mengkolaborasi pasar, negara, dan aultrisme atau kesalehan sosial yang ditawarkan dalam artikel ini sebuah model penanggulangan berbasis kewirausahaan sosial. Model ini merekomendasikan agar perusahaan publik besar, swasta dan seluruh kementerian di Indonesia berperan sebagai wirausaha sosial dalam menjaga keberlanjutan program sosialnya.

### **Kata kunci:**

Dampak sosial;  
ekonomi; covid-19;  
UMKM

### **Artikel ;**

Diterima: 10/5/ 2024  
Diperbaiki: 15/5/ 2024  
Diterbitkan: 20/5/2024

## **PENDAHULUAN**

Beberapa bulan terakhir, topik tentang virus Corona menjadi topik hangat, bahkan mulai dari keramaian di Angkringan hingga media ilmiah ramai membicarakan soal Corona. Alur pembicaraannya banyak yang melakukan analisa menggunakan prespektif yang bukan merupakan bidangnya berdasarkan sedikit info yang didapat. Jika analisisnya benar tidak akan menimbulkan masalah namun jika salah maka akan berbeda dan menyesatkan. Contoh kejadian yang penulis alami sendiri, sekitar dua bulan yang lalu di salah satu anjungan tunai mandiri (ATM) wilayah Yogyakarta, terdapat tukang parkir yang rajin mengingatkan kepada setiap pengunjung bahwasanya virus Corona itu adanya di Jakarta, sementara untuk daerah Yogyakarta terbilang masih aman, padahal Provinsi DIY sampai dengan akhir Oktober Tahun 2020 masih mengalami peningkatan pada jumlah orang dengan status positif Corona. Bentuk tindakan tukang parkir tersebut bisa dimaknai sebagai representasi perasaan takut seandainya banyak orang tidak mau keluar rumah. Dampaknya akan tidak ada lagi kendaraan yang parkir dan jika hal itu terjadi, dapat mempengaruhi pendapatan.



Berkurangnya mobilitas masyarakat dalam situasi Corona ini dipengaruhi oleh rasa takut tertular, perasaan tersebut kini dirasakan oleh semua orang di dunia. Virus Covid-19 yang pertama kali muncul di Kota Wuhan Negara Cina pada Bulan Desember Tahun 2019, bergerak sangat cepat ke berbagai negara, sehingga merupakan suatu pandemi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), arti pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat parahnya jumlah korban atau infeksi, melainkan dengan penyebaran virus yang menyebar dengan cepat. dan melanda negara-negara di seluruh dunia. Perasaan takut inilah yang mendorong masyarakat, baik oleh hati nuraninya sendiri, maupun oleh pemerintah, untuk tetap berada di rumah dan menjaga fisiknya agar tidak terinfeksi tanpa memakai masker dan mencuci tangan. Fenomena ini membawa manusia ke dalam kehidupan baru yang mencakup cara bekerja, belajar hingga bersosialisasi. Kenormalan baru ini menimbulkan efek yang dampaknya paling nyata adalah ekonomi. Kondisi ini menyebabkan setiap individu mengalami penurunan produktivitas dalam kegiatan ekonominya, baik dalam lingkup produksi maupun konsumsi.

Penurunan produktivitas tentu berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial, walaupun sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia sejak tahun 2015, mengalami penurunan, namun semakin parah karena situasi pandemi Corona. Sebagaimana yang disampaikan Rizal Ramli dalam salah satu forum ilmiahnya;

“Kondisi ekonomi Negara Indonesia sejatinya sudah sangat jelek sebelum terjadinya pandemi COVID-19”. Menurutnya memang pandemi tersebut berkontribusi memperparah krisis ekonomi yang terjadi, ibarat orang yang sudah jalan sempoyongan kemudian ditinju”.

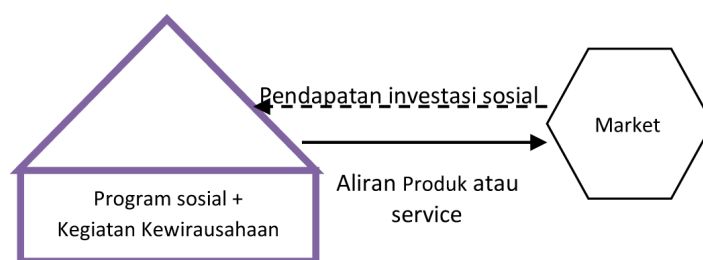
Banyak ilmuwan sosial dan ekonomi nasional dan dunia yang memiliki pendapat sama mengenai dampak ekonomi akibat pandemi, yang berbeda dengan krisis tahun 1998. Pada tahun 2007, dampak pandemi meliputi seluruh pelaku usaha, sedangkan dua krisis sebelumnya tidak berdampak pada pelaku usaha. Usaha kecil dan menengah, bahkan UKM, dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia, pendapat ini juga diungkapkan dengan tegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan negara Indonesia.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya? Dari pertanyaan tersebut, tujuan artikel disusun untuk memberikan informasi tambahan atau kajian mengenai strategi penanganan dampak pandemi, kajian lebih fokus pada pendekatan “kewirausahaan sosial sebagai solusi dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19”. Konstruksi refleksi berbasis pendekatan konsep kewirausahaan sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep kewirausahaan sosial sebagai strategi dalam menghadapi permasalahan sosial berdasarkan pemberdayaan sekaligus refleksi terhadap solusi yang muncul. digunakan sebagai acuan bagi pelaku ekonomi dan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang bertujuan mengatasi dampak Covid-19. Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu memahami konsep new normal dan kewirausahaan sosial agar dapat gambaran pendahuluan. Istilah new normal sudah ada sejak dulu, digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan dunia akibat krisis ekonomi.

Menurut Roger McNamee , new normal selalu akan terjadi di sepanjang kehidupan manusia.Oleh karena itu manusia harus sabar belajar dan terus mengembangkan respon yang tepat terhadap tuntutan yang terjadi. Bahkan,McNamee menambahkan, makna istilah “normal” dalam new normal terkait dengan skala waktu, berkaitan dengan upaya manusia untuk mengembangkan cara yang tepat untuk meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik dalam jangka panjang.

Sementara itu, konsep kewirausahaan sosial sebagai pendekatan yang digunakan untuk membangun solusi berasal dari pemikiran Nicholls and Cho (Nicholls & Cho, 2006), “merupakan sebuah konsep dalam kegiatan kewirausahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit serta menyelesaikan masalah sosial dan atau lingkungan”.Berangkat dari definisi tersebut, menurut penulis, konsep sosial dapat dikondisikan kedalam dua hal: jika dikaitkan dengan sudut pandang pelaku usaha,maka menggunakan logika “kapitalis baik”, berpikir memperoleh keuntungan manfaat sosial dan investasi sosial sekaligus. Sementara itu, pemerintah sedang memikirkan sinergi antara perusahaan besar publik atau swasta dengan usaha kecil dan mengkondisikan kegiatan ekonomi masing-masing kementerian untuk investasi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.

Implementasi pola pelaksanaannya dikembangkan oleh Alter, S.K. kedalam rumusan tiga model kewirausahaan sosial, keterkaitannya pada keberlanjutan usaha pemberdaya mempengaruhi keberlangsungan investasi sosial pada komunitas sasarnya; (1) Model integrated merupakan model kewirausahaan sosial dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku dan masyarakat adalah sama, hal ini yang dapat diterjemahkan menjadi masyarakat sasaran bekerja dalam kegiatan milik pihak atau kelompok yang memberdayakan, secara sederhana dapat dilihat dalam Gambar 1.

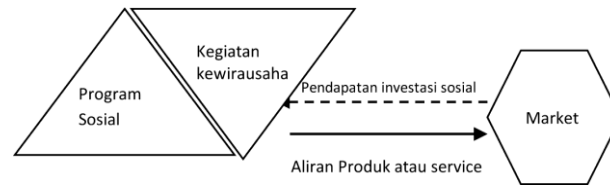


Gambar 1.

Model Integratif (Modifikasi)

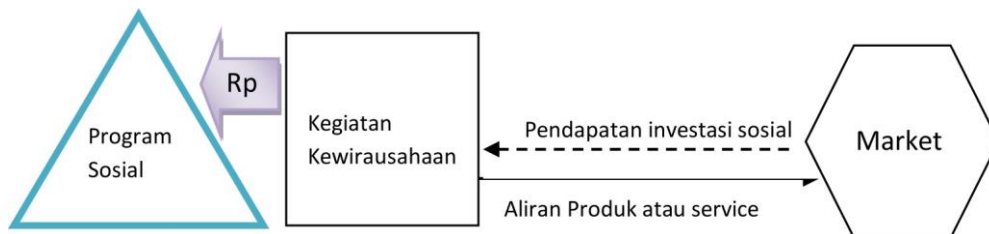
Sumber: Alter. S,K (2007)

Model no (2) adalah bersinggungan, yakni kegiatan ekonomi pemberdaya dengan komunitas sasaran saling melengkapi atau berhubungan, sebagai contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan bank sampah milik Aziz di Kabupaten Bantul, komunitas sasaran sebagai supplier sampah yang akan dibeli dan diolah oleh bank sampah menjadi kerajinan daur ulang, lihat Gambar 2.



Gambar 2.  
Model Bersinggungan (Modifikasi)  
Sumber: Alter. S,K (2006)

Terakhir adalah (3) Model terpisah, antara kegiatan ekonomi pemberdaya dan komunitas sasaran terpisah, atau tidak saling melengkapi bahkan tidak terdapat hubungan sama sekali. Model ini banyak diterapkan dalam program CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Darmawi, 2019), seperti yang dilakukan salah satu BUMN, yaitu TWC (Taman Wisata Candi) di Yogyakarta yang melakukan pemberdayaan ekonomi olahan makanan singkong pada komunitas sasaran para Ibu rumah tangga di Dusun Cepit Desa Bokoharjo Prambanan. Pilihan terhadap olahan singkong dikarenakan banyaknya tanaman bahan baku di sekitar wilayah sasaran. Lebih lanjut bentuk sederhana alur pada model terpisah bisa dilihat di Gambar tiga yang ada di bawah ini.



Gambar 3.  
Model Terpisah (Modifikasi)  
Sumber: Alter. S,K (2007)

## METODE

Untuk mengetahui tujuan penelitian dan beradaptasi dengan situasi pandemi corona sehingga mengurangi penelitian di lapangan, pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*), merupakan pendekatan penelitian yang tidak menggunakan data primer dan menitik beratkan pada kajian data sekunder. Artikel ini berfokus pada data sekunder, termasuk tulisan yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga tahun 2020, yang menjadi tujuan penulisan artikel. Strategi analisis: mengumpulkan berbagai artikel dari surat kabar, forum kegiatan ilmiah dan/atau media.

Internet terkait dampak pandemi terhadap kegiatan perekonomian dan solusinya di Indonesia. Berbagai artikel yang diperoleh dianalisis agar penulis dapat



memahami skala masalah dan dampak ekonomi dari pandemi, yang nantinya menjadi dasar untuk merumuskan model solusi berdasarkan perspektif konsep kewirausahaan sosial.

Berdasarkan penelusuran artikel mengenai dampak pandemi Covid 19 yang dilakukan melalui Google Scholar, Google Research Gate, kami menemukan 8 artikel mengenai dampak dan keekonomian pandemi. Covid-19. Sedangkan, analisis artikel tentang pemberdayaan masyarakat berbasis sosial dilakukan terhadap lima hasil penelitian yaitu teori tentang kewirausahaan sosial, yang bertujuan untuk merumuskan model strategis penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Uraian-uraian hasil dan pembahasan pada artikel ini akan disajikan dalam tiga bagian, analisa penyebab turunnya produktivitas selama pandemi corona, dampak sosial ekonomi, dan alternatif solusi berbasis kewirausahaan sosial.

### **Penyebab Turunnya Produktivitas Selama Pandemi Corona**

Beberapa pemerintah daerah memberlakukan normalitas baru (New Norms) dalam aturan mereka selama pandemi Covid-19. Namun, tidak semua pemerintah daerah memberlakukannya dalam bentuk aturan dengan hukuman. Provinsi Yogyakarta adalah salah satu daerah yang menghindari normalitas baru yang didasarkan pada aturan dan lebih memilih untuk menyebarkan nilai-nilai baru selama pandemi. Dalam situasi darurat, gubernur DIY sering kali menyatakan bahwa tidak ada gunanya menutup atau membatasi keluar rumah. Jika logika yang digunakan didasarkan pada aturan, itu akan mengakibatkan penutupan banyak sumber pendapatan masyarakat. Ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang dikeluarkan pada Juni 2020, yang menetapkan bahwa daerah harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah pusat sebelum dapat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan kerja dari rumah (WFH), terutama di lembaga pendidikan pada semua tingkat, dan protokol Covid-19 diterapkan di tempat-tempat keramaian atau aktivitas yang mengundang kerumunan massa, adalah langkah kongkrit yang telah diambil pemerintah untuk mengurangi jumlah pasien COVID-19.

Meskipun tidak mencakup semua lini kehidupan, ruang gerak masyarakat Indonesia masih terbatas. Prinsip dasar pasar adalah pertemuan penjual dan pembeli, sehingga adanya batas gerak memengaruhi aktivitas pasar yang melibatkan banyak orang dengan peran ekonomi yang berbeda. Ini memengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. Selama pandemi COVID-19, fokus perhatian tidak hanya pada penanggulangan, tetapi juga pada penyebabnya. Karena pandemi ini terjadi di semua negara, masalahnya kompleks. Penyebab krisis adalah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat dan belum memiliki obat atau vaksin. Kedua faktor ini menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat. Yang pertama adalah cara virus itu menyebar, dan yang kedua adalah bagaimana lingkungan ekonomi



global telah diubah dalam beberapa tahun terakhir, dengan peleburan batas antar negara.

Sifat penyebaran virus menyebabkan mobilitas orang terbatas. Ini karena virus menyebar melalui kontak dengan anggota badan, benda, dan nafas atau batuk. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Kantar menunjukkan bahwa, dari awal April hingga Juni 2020, hampir 80 persen orang Indonesia menghabiskan waktu di rumah selama masa karantina atau darurat. Jumlah ini turun menjadi sekitar 40% sejak new normal diberlakukan. Menariknya, trend ini terjadi di kedua kota besar yang rata-rata berada di zona merah dan kota kecil yang berada di zona kuning atau hijau. Meskipun demikian, masih ada perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kelas bawah, tentang apakah indikator zona merah atau kuning dan bagaimana pemerintah memperlakukan setiap zona secara berbeda. Walaupun masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama tentang kategorisasi zona secara menyeluruh, bisnis yang membutuhkan mobilitas manusia terus berkurang atau bahkan terhenti, seperti transportasi, hotel, mall, pusat olahraga, industri pariwisata, infrastruktur, dan pasar, baik modern maupun tradisional.

Karena globalisasi ekonomi, yaitu peningkatan ketergantungan ekonomi antarnegara melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas, terbatasnya mobilitas gerak sudah mengganggu produktivitas bisnis. Tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang didirikan pada tahun 2015, adalah untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN dan negara-negara di luar ASEAN. Tujuan ini juga dimiliki oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yang juga beroperasi dengan tujuan yang sama. Jadi, berdasarkan kronologi, dari perspektif integrasi ekonomi—juga dikenal sebagai "globalisasi ekonomi"—virus yang menyebar di Cina menyebabkan karantina total, yang menghentikan berbagai bisnis. Situasi ini segera berdampak pada negara-negara yang menjadi mitra dagang Cina, termasuk Indonesia, terutama yang menyediakan bahan baku. Itu karena Cina telah menjadi negara eksportir terbesar di dunia selama sepuluh tahun terakhir. Oleh karena itu, kemerosotan perdagangan di Cina akan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia dan negara-negara lain. Salah satu perusahaan eksportir kayu lapis di Yogyakarta telah berhenti memproduksi kayu lapis sejak Desember 2019 karena permintaan dari Cina telah berhenti karena status lockdown yang diterapkannya. Meskipun kembali beroperasi pada Agustus 2020, volume pengiriman telah berkurang.

Kedua komponen di atas mendorong orang untuk berperilaku hidup sehat dan banyak melakukan aktivitas konsumsi yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, rumah (domestik), dan lingkungan sekitar mereka. Perubahan perilaku konsumsi adalah salah satu contoh strategi coping—atau kemampuan mengelola stress—yang banyak dilakukan orang selama pandemi COVID-19 ketika terpaksa tinggal di lingkungan sosial terbatas dan penuh ketidakpastian untuk waktu yang lama. Ini dilakukan karena desakan situasi, kondisi ekonomi, dan masalah kesehatan. Jadi, ciri manusia modern adalah mengubah perilaku hidup sehat dan konsumsi domestik, beralih dari keinginan (want) untuk memenuhi aktualisasi diri ke produk



yang berfokus pada kebutuhan (*needs*) fisiologis dan rasa aman jiwa raga (Schultz, 2011). Bahkan, masyarakat cenderung mendukung gerakan degrowth karena konsumsi orang di berbagai sektor sudah melampaui sumber daya alam. Selain mempertimbangkan untuk menjadi vegetarian, kesalehan sosial masyarakat semakin meningkat, yang dapat dilihat dari banyaknya aktivitas perbaikan lingkungan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendaur ulang, memperbaiki, mendekorasi ulang, dan mendonasikan barang atau makanan yang masih layak. Sudah menjadi sifat alamiah manusia bahwa musibah selalu diikuti dengan kebangkitan dan atau peningkatan solidaritas sosial.

Hasil uraian analisis pada bagian ini merupakan pengembangan dari kajian artikel-artikel, terlihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 1

Matriks Sintesis Mengenai Penyebab Turunnya Produktivitas Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19

No.	Sumber dan Tahun	Penyebab Turunnya Produktivitas Selama Pandemi Covid 19
1.	(Suryahadi et al., 2020), (Yamali & Putri, 2020)	Sosialisasi mobilitas gerak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara langsung mempengaruhi keseharian masyarakat pada semua aspek, walaupun masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan.
2.	(Hadiwardoyo, 2020), (Nasution et al., 2020), (Sitorus & Hidayat, 2020), (Yunus & Rezki, 2020),	Perubahan perilaku belanja masyarakat dan melakukan aktivitas mempengaruhi produktivitas menyeluruh

Sumber: Dokumetasi peneliti

### Dampak Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19

Kedua penyebab di atas berkorelasi satu sama lain, yang menyebabkan penurunan atau penutupan bisnis tertentu. Keadaan ini menyebabkan banyak PHK dan kurangnya aliran produksi dan konsumsi di antara bisnis dan masyarakat. Dari April hingga Juli 2020, banyak hotel, mal, tempat wisata, dan bisnis lainnya ditutup. Di Provinsi Yogyakarta, hal ini menyebabkan beberapa hotel dijual karena pemilik tidak dapat membayar hutang. Ada kemungkinan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah kita bahwa banyak bisnis ditutup selama tiga atau empat bulan di seluruh negara atau di seluruh dunia. Kondisi ekonomi saat ini memicu krisis, yang mengakibatkan penurunan pendapatan domestik negara (GDP), yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, dan, jika tidak dapat ditanggulangi, meningkatkan inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Dalam konteks sosial, krisis ekonomi dapat menyebabkan keresahan sosial dan kerawanan sosial; di sisi lain, munculnya masalah sosial dapat memicu krisis politik.

Sementara Suryahadi, dkk (2020) dalam penelitian mereka memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia akan meningkat pada akhir tahun 2020, mengakibatkan sekitar 8 juta orang menjadi lebih miskin sebagai akibat dari



pandemi Covid-19. Data estimasi ini didasarkan pada (1) data Susenas bulan Maret dan September 2019; (2) mengamati pola peningkatan kemiskinan tahun 2006 dan 2007 yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak global; dan (3) berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dengan penurunan 1% akan menambah sekitar 1,4% persentase tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut Sugiri (2020), data Kementerian Ketenagakerjaan untuk Mei 2020 menunjukkan bahwa 1,7 juta pekerja formal dirumahkan, 749,4 ribu di PHK, dan 100 ribu pekerja migran dipulangkan. Dengan mempertimbangkan berapa lama data tersebut dirilis dan fakta bahwa pandemi COVID-19 belum selesai pada pertengahan Oktober 2020, dapat dipastikan bahwa jumlahnya akan terus meningkat. Akibatnya, lembaga serikat pekerja Indonesia sering muncul di media televisi dan koran dengan meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terkait keadaan tenaga kerja Indonesia.

Pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran baru merupakan masalah sosial tersendiri yang, jika tidak segera ditangani, berpotensi menimbulkan masalah lain. Berkurangnya pendapatan dapat menyebabkan penyimpangan sosial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, dengan solusi yang terbatas. Menurunnya pendapatan tentunya berdampak langsung pada kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan, ini tidak hanya terkait dengan penurunan kemampuan untuk mendapatkan asuransi kesehatan, tetapi juga terkait dengan menjaga pola makan yang sehat untuk diri sendiri dan keluarga. Dampaknya termasuk penurunan sumber daya keuangan, yang mengakibatkan penurunan jumlah penerimaan siswa baru pada tahun 2020 dan peningkatan jumlah siswa yang mengambil cuti semester. Lembaga Oxfam (OXFAM, 2020) menyatakan bahwa akibat pandemi COVID-19, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin meningkat di setiap negara di seluruh dunia. Indonesia sekarang berada di peringkat ke-4 di ASEAN dengan peringkat global 93. Peringkat ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018, ketika Indonesia masih berada di kisaran 90 dan masih berada dalam kategori ketimpangan sosial dan ekonomi yang luas.

Ketimpangan, atau ketidaksamaan, menunjukkan bahwa kelompok atas mendapatkan lebih banyak dari kue ekonomi. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa ketimpangan menyebabkan kecemburuan sosial dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan konflik sosial dan kegaduhan politik. Bahkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata dapat mengubah definisi kemiskinan dalam masyarakat. Sekarang, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sandang, pangan, dan papan; sebaliknya, kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan orang lain. Seketika sekelompok orang merasa tidak adil, mereka akan melakukan proses perbandingan, atau referensi kelompok, dengan kelompok yang lebih besar dari mereka. Kegaduhan sosial di media sosial dan perilaku-perilaku intoleran dapat dipicu oleh perubahan persepsi kemiskinan, peningkatan ketimpangan, dan peningkatan angka pengangguran. Akhirnya, hal itu dapat



merusak persatuan dan secara bertahap mengarah pada krisis di bidang politik tanah air kita, Indonesia.

Analisis di atas dihasilkan dari proses kajian hasil penelitian mengenai dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia, matrik sintesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Matrik Sintesis Mengenai Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Covid-19

No.	Sumber dan Tahun	Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Covid 19 di Indonesia
1.	(Suryahadi et al., 2020)	Pandemi Covid-19 akan menciptakan kemiskinan baru di Indonesia sebanyak 8 juta
2.	(OXFAM, 2020)	Pandemi Covid-19 akan memperlebar ketimpangan sosial, termasuk di Indonesia
3.	(Yamali & Putri, 2020)	Sebagaimana akibat dari adanya penurunan pendapatan, krisis ekonomi akibat Covid-19 yang bersifat menyeluruh kalau tidak diantisipasi dapat meningkatkan perilaku penyimpangan sosial masif.
4.	(Hadiwardoyo, 2020), (Nasution et al., 2020), (Sitorus & Hidayat, 2020), (Yunus & Rezki, 2020)	Peningkatan kejenuhan akibat terlalu banyak berada di rumah merupakan embriopenyimpangan perilaku dan depresi, sehingga secara langsung mempengaruhi tingkat produktivitas.

Sumber: Dokumentasi peneliti

### **Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 melalui Kewirausahaan Sosial**

Tabel intisari hasil penelitian mengenai pemberdayaan berbasis kewirausahaan sosial—konsep pemberdayaan berbasis kegiatan ekonomi—menunjukkan bahwa pentingnya saling memperhatikan antar sesama adalah dasar dari perumusan model penanganan dampak pandemi COVID-19 dalam artikel ini. Secara ringkas hasil proses literatur review dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 3.

Matrik Sintesis Mengenai Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan Sosial

No.	Sumber dan Tahun	Pemberdayaan Komunitas Berbasis Kewirausahaan sosial
1.	(Darmawi, 2019)	Kepedulian perusahaan yang tertuang dalam pelaksanaan program CSR dalam bentuk memberikan akses pendidikan dan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya merupakan langkah efektif dalam menyelesaikan masalah sosial, dan ini dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah
2.	(Torrido, 2016)	Terciptanya penguatan program kepedulian sosial lebih cepat terwujud melalui kebijakan pemerintah
3.	(Torrido, 2016), (Hakim & Wibisono, 2017)	Pemanfaatan modal sosial yang dikondisikan kedalam aturan di organisasi local bisa diarahkan untuk mewujudkan kesalehan sosial

Sumber: Dokumentasi peneliti



Pemerintah telah menerapkan kebijakan investasi ori dan sukuk selama lima tahun terakhir. Sukuk adalah cara pemerintah menjamin dana dengan bunga tinggi di bank-bank milik negara. Selama pandemi, presentase bunga untuk kedua jenis investasi naik, sementara suku bunga untuk tabungan dan deposito turun. Kedua bentuk kebijakan tersebut menarik dan menguntungkan kelas menengah dan atas dengan dana simpanan yang besar. Bisnis dipaksa untuk menunggu, beralih bisnis, atau menanamkan modal mereka dalam surat berharga sebagai akibat dari pandemi. Pemerintah telah menggunakan kebijakan ini untuk mendapatkan dana baru untuk pembangunan dengan meminjam uang ke masyarakat. Ini telah dilakukan dengan menggunakan metode sukuk dan surat berharga ori. Kebijakan ekonomi ini mengurangi uang negara, menunjukkan perekonomian Indonesia tidak stabil. Sedikit memberikan pemahaman tentang alasan pemerintah terus mempertimbangkan strategi ekonomi dalam mencegah penyebaran pandemi corona di Indonesia dan tidak memberlakukan lockdown.

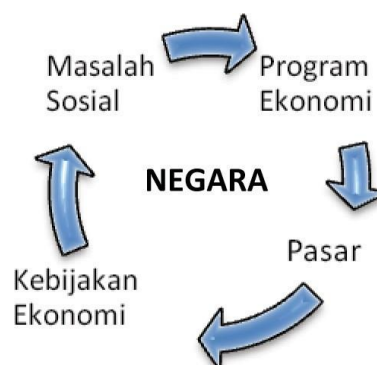
Dengan mempertimbangkan contoh dari dua krisis ekonomi sebelumnya, menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengatasi kerentanan ekonomi nasional adalah pilihan yang tepat. Disebabkan fakta bahwa jenis usaha kecil menengah (UKM) tidak membutuhkan modal besar dan teknologi canggih, sehingga sangat mudah untuk mengelutinya, peningkatan jumlah pengangguran diikuti oleh peningkatan jumlah pelaku usaha kecil menengah (UKM). Namun, ini berbeda dengan usaha besar, yang membutuhkan dana besar dan teknologi yang tidak dapat diikuti oleh semua orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap pengkondisian kegiatan kewirausahaan sebagai solusi otonom. Fenomena ini sangat relevan terjadi lagi selama pandemi, karena industri bahan pangan, kuliner, dekorasi rumah, taman, agrobisnis, kesehatan, dan hiburan mengalami peningkatan pendapatan karena penggunaan internet yang semakin meningkat. Menurut Narsih (57), pemilik bisnis penjualan tanaman anggrek di Sleman yang telah bekerja selama empat tahun, "Sampai September 2020 penjualan tanaman anggrek mengalami peningkatan 250%, sedangkan penjualan pot sebagai sampingan mengalami peningkatan 400% dari biasanya sebelum pandemi" (Wawancara dengan Narsih, pemilik usaha agrobisnis di Yogyakarta, 2020). Jadi, selama pandemi, lebih banyak orang yang membuka bisnis di bidang yang menghasilkan lebih banyak uang. Orang-orang ini berasal dari pengangguran baru dan mengalihkan bisnis mereka ke bidang yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Oleh karena itu, ada tiga fakta tentang situasi pandemi: (1) kemungkinan munculnya UKM baru di bidang usaha tertentu; (2) tantangan ekonomi dan kesehatan yang memengaruhi upaya pemerintah untuk menangani pandemi; dan (3) meningkatnya altruisme di masyarakat Indonesia, yang merupakan sifat memperhatikan kesejahteraan orang lain, yang dapat muncul karena modal sosial



dan solidaritas yang ada di Indonesia. Ini terbukti dengan berbagai inisiatif penggalangan dana untuk COVID-19, dari pengadaan APD hingga pembagian sembako, meskipun inisiatif ini tidak berkelanjutan. Penanganan dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 bergantung pada tiga fakta: pasar, negara, dan sifat altruisme masyarakat. Ketiga hal ini berkontribusi terbesar pada kehidupan masyarakat selama pandemi. Oleh karena itu, sebuah strategi yang didasarkan pada kegiatan ekonomi diperlukan. Strategi ini akan memungkinkan ketiganya untuk bekerja sama, dan akan menghasilkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi jika infrastruktur digital diubah untuk membantu mencapai tujuan.

Karena model strategi penanggulangan dampak bertujuan untuk menghidupkan pasar dan menyelesaikan masalah sosial, pendekatan kegiatan kewirausahaan dipilih. Dengan menjadikan negara sebagai kelompok yang memiliki hak istimewa seperti pembuat kebijakan dan kemampuan untuk menaik turunkan pajak, metode negara digunakan untuk mempercepat pelaksanaan tujuan bisnis. Sebuah alternatif untuk menyelesaikan masalah sosial yang bekerja sama dengan pasar adalah pendekatan konsep kewirausahaan sosial (lihat Gambar 4). Kewirausahaan sosial dapat diterapkan melalui kebijakan ekonomi berbasis kewirausahaan sosial, serta program kegiatan ekonomi berbasis kewirausahaan sosial melalui lembaga pemerintah, BUMN, dan pusat daerah. Kegiatan ekonomi yang berfokus pada keuntungan memungkinkan komunitas sasaran untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang dibahas dalam artikel ini adalah peningkatan angka kemiskinan di masyarakat Indonesia sebagai akibat dari penurunan atau penundaan sumber pendapatan mereka. Oleh karena itu, model strategi ini bertujuan untuk menghubungkan tujuan sosial dengan usaha ekonomi untuk mencapai keberlanjutan.



Model Strategi Penanggulangan Dampak Pandemi  
Berbasis Kewirausahaan Sosial  
Sumber: Hasil Analisis, 2020



Dua kebijakan berbasis kewirausahaan sosial termasuk dalam model strategi penanggulangan ini. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi berbasis kewirausahaan sosial. Untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi, antara lain: (1) dana stimulus amal sebesar 200 ribu; (2) penanguhan angsuran KUR UMKM dan driver ojek online; (3) pemberian insentif pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (4) program pra-kerja (dengan insentif 600 ribu dan pelatihan selama 4 bulan); dan (5) pemberian insentif pajak. Persyaratan administratif untuk perolehannya adalah bahwa ia diberikan kepada pelaku usaha kecil, menengah, atau besar yang mendapatkan dukungan dana atau fasilitas yang signifikan dari pemerintah daerah atau pusat bersama para UKM. UKM-UKM ini, yang bidang usahanya menghasilkan peningkatan pendapatan selama pandemi COVID-19, diharuskan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di lingkungannya melalui pemberdayaan ekonomi (CED). Keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial disesuaikan dengan tingkat usaha.

Keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial harus dipandang sebagai pemberdayaan, bukan kebajikan. Usaha kecil dan menengah dapat menggunakan model kewirausahaan sosial integratif dan bersinggungan, di mana pelaku usaha memperkerjakan tetangga atau saudara tanpa mempertimbangkan apakah klien atau target memiliki pengalaman apa pun. Memperkerjakan di sini adalah kegiatan pemberdayaan yang bersifat belajar dari pengalaman. Karena pendekatan kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk menghasilkan uang, peran klien disesuaikan untuk meminimalkan risiko kerugian bisnis. Sementara penerapan model kewirausahaan sosial merupakan masalah yang lebih khusus, ada dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam situasi di mana lingkungan usaha melemah: (1) memilih target sasaran yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai pemasok bahan baku atau penunjang yang lemah dan kemudian diajak sebagai penyalur input produksi perusahaan sosial (perusahaan yang menerapkan pendekatan kewirausahaan sosial); dan (2) jika keberlangsungan usaha kuat memungkinkan supplier baru untuk mengubah komunitas sarasannya. Pelaku usaha besar berbeda dengan pelaku usaha kecil, yang tidak menerima bantuan tunai langsung tetapi mendapatkan fasilitas keringanan pajak. Pengaturan mereka berdasarkan peraturan corporate social responsibility (CSR) yang sudah ada, dan mereka dapat menerapkan salah satu dari tiga model kewirausahaan sosial yang tersedia. Namun, di era pandemi, pelaku usaha besar memiliki modal yang besar sehingga mudah melakukan inovasi usaha yang disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan.

Kedua, pembuatan program ekonomi oleh institusi pemerintah dan BUMN. Lembaga-lembaga pemberdayaan seperti pemerintah daerah dan pusat selalu memasukkan misi sosial dalam anggaran mereka. Dengan menggunakan model



strategi, program ekonomi diharapkan untuk memperoleh keuntungan usaha (logika ekonomi) dan kemudian dapat dialokasikan untuk reinvestasi dalam program sosial. Sangat penting untuk menerapkan model kewirausahaan sosial ke dalam program ekonomi yang dijalankan oleh lembaga pemerintah yang paling sesuai. Tekniknya adalah dengan memberikan komunitas sasaran wewenang untuk mengelola sepenuhnya operasi setelah proses pemberdayaan, di bawah pengawasan pemilik usaha pemerintah. Untuk membuat operasi pemberdayaan lebih efisien dan efektif, pengkondisian produk dan usaha pemberdayaan harus dilakukan dengan pendekatan dari dasar dan berbasis lokalitas. Selama proses ini, penting untuk mempertimbangkan pengkondisian kerja sama antara anggota komunitas. Anggaran institusi pemerintah berbeda, jadi ukuran komunitas sasaran disesuaikan dengan mereka.

BUMN memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar daripada institusi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan, sehingga mereka memiliki fleksibilitas yang lebih besar saat memutuskan untuk menerapkan model kewirausahaan sosial. Akibatnya, BUMN dapat memutuskan secara mandiri apakah mereka akan menerapkan model kewirausahaan sosial sama dengan usaha besar. Organisasi besar dan BUMN telah memiliki komunitas dampingan sejak lama. Ini terjadi meskipun jumlah dana yang dialokasikan masih diatur oleh undang-undang CSR saat ini (Torrido, 2016). Meskipun demikian, fakta bahwa sebagian besar lembaga pemberdayaan hanya membentuk kelompok dan memberikan dukungan dana, sumber daya, dan waktu saja, menunjukkan bahwa penerapan logika ekonomi dalam melaksanakan kegiatan pendampingan komunitas dampingan belum dilakukan.

Ke depan, BUMN, usaha besar, dan lembaga pelayanan pemerintah akan mendukung penyelesaian masalah sosial dengan menerapkan kegiatan pemberdayaan. Metode yang digunakan dengan kewirausahaan, logika ekonomi, dan diimbangi dengan pertumbuhan kebiasaan membeli barang lokal atau produk UKM Indonesia untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan kantor dan layanan mereka. "Membeli produk hasil pemberdayaan" adalah salah satu bentuk pendayaan ekonomi komunitas sasaran pemberdayaan dalam konteks ekonomi, yang mencakup peningkatan kapasitas dan pendayaan ekonomi untuk menyelesaikan masalah sosial. Selama ini, lembaga pemerintah dan swasta hanya melakukan pemberdayaan, seperti pelatihan dan pemberian modal, tanpa mempertimbangkan keberlangsungannya. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa orang masih jarang atau sama sekali tidak membeli barang-barang UKM dari pihak swasta dan pemerintah.

Jika tidak dilakukan dengan baik, pembelian produk pemberdayaan menunjukkan kepedulian dan menjaga keberlangsungan usaha. Jika tidak dilakukan, ini akan menimbulkan kebencian publik terhadap pemerintah atau



pekerja sosial. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di kelompok usaha kecil menengah sentra kerajinan batik kayu di Dusun Krebet Sendangsari Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kepercayaan mereka terhadap inisiatif pemerintah dan swasta menurun. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada perolehan materi secara langsung, yaitu uang atau peralatan, karena mereka terlibat dalam program pemberdayaan baik pemerintah maupun swasta. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuat aturan "hati-hati" untuk kegiatan pemberdayaan, sehingga lebih mudah untuk melihat seberapa kuat kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaannya. Keberadaan norma kepercayaan dapat membantu membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemberdaya dengan masyarakat (Hakim & Wibisono, 2017).

Output usulan model yang berbasis kebijakan ini: (1) Menjadikan pelaku UKM sebagai target pemberdayaan, tetapi mendorong mereka untuk menjadi social enterprise bagi pelaku UKM lain dengan memodifikasi kapasitas usahanya; (2) Menjadikan lembaga pelayanan milik pemerintah non-usaha sebagai social enterprise; (3) Menggalakkan investasi sosial berbasis CED dan tradisi membeli barang UKM untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kebutuhan bisnis.

Mungkin bagi Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan model strategi penanggulangan ini. Selain pendamping yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, ada Lembaga Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) yang beroperasi di setiap daerah. PLUT juga memiliki pelatih UKM dari praktisi yang memiliki sertifikat. Selain itu, ada Pekerja Sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan PKH yang ada di setiap kecamatan. Sumber daya ini dapat disesuaikan untuk pengawas, tetapi sebelum itu, pengawas harus diberi pemberdayaan untuk menyamakan persepsi dan menambah pengetahuan tentang kegiatan ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Pendekatan konsep kewirausahaan sosial dapat didekatkan dengan penciptaan dan pengembangan pasar serta penyelesaian masalah sosial dalam kegiatan pemberdayaan. Kedua pendekatan saling berhubungan, sehingga pertumbuhan pasar yang sukses mendorong reinvestasi sosial, program sosial lainnya. Oleh karena itu, penciptaan pasar tidak hanya mengubah sistem produksi usaha komunitas sasaran. Meluas, bagaimanapun, sampai lembaga pemberdaya mengakui dirinya sebagai pemilik atau pemilik bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pemberdayaan.

Jika ini dapat dilakukan, manfaatnya adalah sebagai berikut: (1) penyelesaian masalah sosial yang berkelanjutan dapat menghasilkan kemandirian komunitas sasaran yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi individu, keluarga, dan wilayah (ekonomi geografis); (2) semangat untuk kewirausahaan di dalam



komunitas sasaran meningkat; dan (3) lembaga pemberdayaan, baik pemerintah maupun swasta, dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui fundraising, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pengemban. Dalam model strategi penanggulangan dampak sosial ekonomi pandemi corona, lembaga pemberdayaan—baik pemerintah maupun swasta—dianggap sebagai social enterprise.

### **Pengakuan**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada dosen pembimbing Naim, S.Pd., M.Pd. yg telah mendampingi, membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan artikel berlangsung, penyusunan artikel ini tentu sangat bermanfaat untuk peneliti kedepannya dalam penyusunan artikel ilmiah. Semoga artikel yg di dusun oleh peneliti dapat memberikan manfaat bagi khasanah insan penulis khususnya dunia pendidikan.

### **REFERENSI**

- Alter, S. K. (2006). Social enterprise models and their mission and money relationships. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, 205-232.
- Darmawi, A. (2019). The Role of Government , Human Resources and Strategic Role of Training For Life Skill Empowerment. 366(Icisp 2018), 1-4.
- Hadiwardoyo, W.-45088-1-P. pd. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 [National Economic Losses Due to the Covid-19 Pandemic]. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hakim, F. N., & Wibisono, G. (2017). Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*,16(4), 369-380.
- LaBarre, P. (2003). The new normal. *Fast Company*, 70,74.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nicholls, A., & Cho, A. H. (2006). Social entrepreneurship: The structuration of a field. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, 34(4),99-118.
- OXFAM. (2020). The Commitment to Reducing Inequality Index 2020: Fighting Inequality in the time of COVID-19. [www.inequalityindex.org](http://www.inequalityindex.org)
- Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020). Berdaya di Era Pandemi: Peran Corporate Social Responsibility dalam Penanggulangan COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 37-48. <https://doi.org/10.22146/jsds.473>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*,



19(1), 76–86.

- Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia | The SMERU Research Institute. *Poverty & Inequality Indonesia*, April. <https://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
- Torrado, A. (2016). Peran Lembaga Keuangan Penyedia Dana Mikro Dalam Menyediakan Kesempatan Kerja. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 131–143.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>